

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Hendra Kusuma^{*)}

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah diberlakukan sejak tahun 2000, konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah diberikannya kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Namun dalam penerapan kewenangan tersebut terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah apakah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran pemerintah pusat dalam membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tercermin dari berbagai macam dana transfer yang diberikan seperti DAU, DAK dan DBH. Dengan menggunakan data provinsi di pulau Jawa dan Sulawesi antara tahun 2010 hingga 2013 serta melihat ukuran desentralisasi dengan proxy yang digunakan adalah kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi (AI_T) dan ukuran kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi (AI_{IT}) maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasil estimasi dengan menggunakan *random effect* menunjukkan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah daerah, indikator desentralisasi fiskal yang diwakili kemampuan dana transfer terhadap pembentukan Pendapatan daerah serta kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi terutama dari kontribusi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : desentralisasi fiskal, dana transfer, pertumbuhan ekonomi, data panel

Fiscal Decentralization and Economic Growth in Indonesia

ABSTRACT

The fiscal decentralization in Indonesia has been applied since 2000, the consequences of this policy are given the financial to local governments. However, there are several issues which are whether the delegation of authority given by the central government to the local governments that can contribute to economic growth in the region in the implementation of authority. The role of central government in helping economic growth in the region is reflected in the various kinds of funds transfer that is given, such as DAU, DAK and DBH. By using data of provinces in Java and Sulawesi between 2010 and 2013 and seeing the size of the decentralization of the proxy used is the capability area of the transfer in the creation of economic growth (AI_T) and the measure capability of local revenue in contributing to economic growth (AI_{IT}), so that it will give more objective overview to economic growth in the region during fiscal decentralization. The result of estimation by using random effect indicate that the ratio of capital expenditures to total expenditures of local governments, indicator of fiscal decentralization represented the capability of funds transfer to the establishment of regional income and the contribution of local revenues to total revenues, concluding that fiscal decentralization in Indonesia have an impact on economic growth, especially the contribution of spending conducted by local governments.

Keywords: fiscal decentralization, funds transfer, economic growth, data panel

*) E-mail: hendraksm9@gmail.com

Ucapan terima kasih dari penulis kepada para akademisi yang ikut berkontribusi dalam penyempurnaan tulisan hingga Universitas Muhammadiyah Malang melalui Fakultas Ekonomi dalam menyediakan pendanaan

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan pintu gerbang reformasi di bidang birokrasi dan ekonomi, dengan berlakunya undang-undang pemerintah daerah telah diberikan saluran baru untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk mendukung berlakunya undang-undang tersebut dana pemerintah yang semula dikelola oleh pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah daerah melalui skema dana transfer.

Transfer pemerintah pusat ke daerah melalui dana perimbangan diperkirakan akan mereduksi peranan pengelolaan fiskal pemerintah pusat, hal sebaliknya akan dirasakan oleh pemerintah daerah dimana proposi total pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD akan meningkat tajam. Pergeseran pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah pada umumnya akan berdampak pada peningkatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri.

Kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. Kemampuan keuangan daerah yang meningkat dari proses desentralisasi akan menimbulkan diskresi daerah dalam bidang anggaran, sehingga terdapat keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Desentralisasi telah mampu meningkatkan pendapatan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat.

Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan

transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan kepada daerah. Manfaat positif dari tingginya dana perimbangan pemerintah pusat adalah jika dana transfer digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan ekonomi, transfer untuk pengeluaran konsumsi barang dan jasa dari pemerintah pusat memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Devarajan, Swaroop, & Zou, 1996).

Menurut Oates (1993) Desentralisasi fiskal telah menjadi sebuah rujukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi lebih baik dan efisien. Dengan berpindahnya beberapa kewenangan dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut diharapkan kebijakan publik yang telah dibuat menjadi lebih baik dan efisien, selain itu pelayanan dan penyediaan kebutuhan publik menjadi selaras dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah.

Untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat jika dalam pemenuhan modal pemerintah daerah hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk pendelegasian pengelolaan keuangan kepada daerah. Provinsi yang ada di pulau sulawesi menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan tahun 2006 proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan mencapai 82 persen. Hal yang sama juga terjadi pada provinsi yang berada di pulau kalimantan, namun secara berturut turut proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah menurun hingga tahun 2010.

Manfaat positif dari tingginya dana perimbangan pemerintah pusat adalah jika dana transfer digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan ekonomik, transfer untuk pengeluaran konsumsi barang dan jasa dari pemerintah pusat memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Devarajan et al., 1996).

Belanja pemerintah yang salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur merupakan sebuah bentuk dari investasi. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya untuk mencari keuntungan, namun untuk kelancaran roda ekonomi masyarakat. Selain pemerintah investasi juga dilakukan oleh masyarakat baik lokal maupun internasional. Sumber daya alam dan manusia yang

dimiliki daerah merupakan daya tarik bagi penanam modal, namun akan lebih menarik jika kelengkapan sarana publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk dari investasinya dapat dipenuhi. Morrison dan Schwartz (1992) menyatakan bahwa bagi penanam modal ketersediaan infrastruktur mampu mengurangi biaya faktor produksi. Selain itu Globerman dan Shapiro (2002) mengemukakan bahwa ketersediaan infrastruktur terutama dari pemerintah adalah determinan penting dalam mempengaruhi investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Peran pemerintah pusat dalam membantu belanja pemerintah daerah yang dicerminkan melalui dana transfer telah diteliti oleh beberapa penelitian empiris. Penelitian Davoodi dan Zou (1998) dengan menggunakan analisis *endogeneous growth model* dan data yang digunakan adalah data panel dengan jumlah observasi 46 negara maju dan berkembang antara tahun 1970 - 1989 menunjukkan bahwa negara maju lebih dapat menerima kebijakan desentralisasi dari pada negara yang sedang berkembang (33% vs 20%) dimana pertumbuhan GDP nya juga lebih tinggi negara maju yang terdesentralisasi dari pada negara berkembang yang terdesentralisasi (2% vs 1,6%).

Penelitian yang lain dilakukan oleh Thornton (2007) dengan membandingkan 19 negara yang tergabung dalam OECD dan model yang digunakan adalah OLS didapatkan bahwa desentralisasi fiskal pada penambahan pendapatan pemerintah daerah melalui transfer tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan hasil menunjukkan dampak yang tidak signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan negara yang tergabung di OECD telah mempunyai kemandirian ekonomi yang sangat tinggi, sehingga akan menjadi sulit untuk membandingkan antar negara anggota OECD. Penelitian yang telah dilakukan oleh Nobuo Akai (2002) dengan menggunakan data *cross section* dan *Time Series* sebanyak 50 negara bagian di Amerika Serikat serta mengikuti persamaan yang telah dibuat Xie, Zou, dan Davoodi (1999), didapatkan hasil bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara bagian tersebut. Ukuran kemampuan daerah atau negara bagian di dalam pelaksanaan belanja daerah terkait dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat menunjukkan nilai yang positif terhadap produk domestik bruto.

Desentralisasi di Indonesia telah membawa banyak perubahan baik positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Anis & Ardi,

2007; Laras & Priyo, 2008; Muslimin, 2010; Priyo, 2005). Keberagaman respon dari desentralisasi juga telah diteliti oleh Davoodi dan Zou (1998) dengan menggunakan menggunakan analisis *endogeneous growth model* dan data panel penelitian desentralisasi yang telah dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa negara maju lebih dapat menerima kebijakan desentralisasi dari pada negara yang sedang berkembang. Sementara penelitian yang lain dengan menggunakan analisis OLS data panel menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak pada penambahan pendapatan pemerintah daerah namun desentralisasi fiskal tidak berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah Thornton (2007). Beberapa penelitian mengenai desentralisasi baik di dalam dan luar negeri tersebut telah memberikan gambaran bahwa desentralisasi fiskal membawa dampak yang beragam kepada negara atau wilayah yang lebih maju.

Indonesia yang telah menerapkan sistem desentralisasi sejak dikeluarkannya UU nomor 22 Tahun 1999 diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sesuai dengan karakteristik yang melekat pada daerah tersebut. Untuk mengetahui apakah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka dibutuhkan pengamatan lebih mengenai proporsi belanja daerah, kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendelegasian sebagian urusan kepada daerah atau desentralisasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan bernegara. Tujuan dari pendelegasian sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat dan menciptakan demokratisasi politik dalam keputusan publik. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan yang lebih rendah diwujudkan dengan memberikan kepercayaan kepada daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan pemungutan pajak, pembentukan dewan dan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, serta bantuan keuangan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Definisi dari desentralisasi mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek administrasi, fiskal, politik dan pembangunan sosial ekonomi.

Desentralisasi mempunyai empat jenis pendelegasian yaitu desentralisasi dibidang urusan

administrasi, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik dan desentralisasi di bidang ekonomi¹. Pendelegasian di bidang urusan dan administrasi merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintah. Dalam desentralisasi pada hakekatnya pemerintah mengemban tiga fungsi utama diantaranya fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stinglitz, 2000). Dalam fungsi distribusi pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih lengkap untuk dapat melaksanakan asas pemerataan pendapatan kepada masyarakat melalui distribusi pembangunan ekonomi serta menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Fungsi alokasi merupakan peran pemerintah dalam mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi termasuk alokasi transfer keuangan dari pemerintah pusat. Dalam fungsi stabilisasi pemerintah bertindak sebagai penyeimbang di berbagai aspek sosial ekonomi seperti tingkat pengangguran, harga dan pertumbuhan ekonomi. Dalam peran tersebut pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggunakan berbagai macam sumber daya yang dimiliki untuk mengurangi pengangguran, menstabilkan harga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Sesuai dengan tujuan dari desentralisasi bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan termasuk dana transfer yang diberikan, maka jika pemerintah daerah dapat memanfaatkannya secara efektif pertumbuhan ekonomi yang stabil akan tercapai dan kestabilan tingkat harga dapat dicapai.

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian di daerah atau pusat. Kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah akan tercapai dengan baik dan akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal mempunyai tiga variasi. *Pertama* desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah/pemerintah daerah. *Kedua* delegasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. *Ketiga* devolusi (pelimpahan), yaitu bukan saja implementasi yang diberikan kepada daerah, tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan oleh daerah (Richard &

Villancourt, 2002).

Perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia masih mempunyai berbagai macam kelemahan dan kekurangan baik dalam konsep maupun dalam implementasinya. Masih terdapat berbagai macam peraturan yang saling berbenturan yang menyebabkan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia kurang berjalan dengan baik. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Halim (2007) akan berjalan dengan baik apabila Pemerintah Pusat kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement

Penyediaan kebutuhan publik oleh pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut dapat mengalokasikan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah ataupun dari dana transfer pemerintah pusat. Menurut Martinez dan McNab (2003) hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi yang bersifat multidimensional, dapat dibedakan dalam hubungan yang bersifat direct dan indirect. Hubungan yang bersifat langsung didasarkan pada pendapat Oates (1993) yang menyebutkan bahwa penyediaan barang publik dalam kerangka desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi yang akan dicapai selaras dengan setting pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Hubungan yang bersifat langsung antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi seperti yang diungkapkan Oates (1993) masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, namun ada beberapa potensi yang dapat dikembangkan terkait masalah hubungan tidak langsung antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang menggambarkan hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh Oates (1993) yang menyatakan bahwa desentralisasi akan menciptakan efisiensi ekonomi dan memiliki pengaruh pembentukan dinamis pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi masih banyak diperdebatkan baik dari sisi teori maupun studi empiris yang juga terus berkembang. Pada awalnya yang lebih diperhatikan adalah kuantitas pengeluaran pemerintah, namun ada tahap selanjutnya mengenai aspek-aspek lain dari kebijakan pemerintah. Selain *cross section studies* yang dilakukan Baffes dan Shah (1998) dan Aschauer (2000), hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah di suatu negara juga telah mendapat perhatian, seperti halnya studi yang dilakukan oleh Rappaport (1999) dengan kasus di Amerika Serikat. Untuk kasus di Indonesia Brata dan Arifin (2003)

1. Tercantum dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

juga telah menganalisis aspek fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

Jin dan Zou (2002) melakukan penelitian mengenai desentralisasi fiskal di China, mendapatkan hasil bahwa desentralisasi pengeluaran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi China. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah pusat lebih efisien dalam mengatur pengeluarannya dibanding pemerintah daerah Zhang dan Zou (1998). Sedangkan desentralisasi di bidang penerimaan berpengaruh positif dan signifikan, hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Shah dan Mundial (1994) bahwa desentralisasi penerimaan akan menstimulasi mobilisasi penerimaan dari sumber-sumber keuangan daerah. Hasil ini mendukung hal yang fundamental bahwa pengaruh dari desentralisasi sangat tergantung pada institusi fiskal dan sistem politik yang ada di negara tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Rodden and Rose-Ackerman (1997) bahwa desentralisasi fiskal terhambat jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai dibanding pemerintah pusat. Teori mengenai rancangan desentralisasi fiskal menyarankan sejumlah potensial *trade off* antara efisiensi dan tujuan lainnya seperti equality dari distribusi sumber daya antar pemerintah atau stabilitas makroekonomi. Beberapa penulis mengatakan bahwa memberikan sedikit kebijakan makroekonomi pada pemerintah daerah akan meningkatkan stabilitas makroekonomi (shah 2006).

Pemberlakuan undang-undang 32 dan 33 tahun 2004 mengenai keuangan pemerintah daerah telah menyebabkan perubahan yang cukup berarti bagi sistem keuangan pemerintahan di Indonesia. Dari undang-undang tersebut pendelegasian sistem keuangan dari pemerintah pusat ke daerah telah merubah pemerintahan yang dahulunya sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi. Kedua undang-undang mengenai desentralisasi tersebut telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, termasuk kewenangan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan keuangannya. Dengan besarnya wewenang yang dilipihkan ke pemerintah daerah, maka diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

DATA DAN METODOLOGI

Model yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi fiskal dalam

pertumbuhan ekonomi mengguakan sampel pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa, Sulawesi dan Papua. Pengambilan sampel pada kabupaten/kota di pulau jawa diharapkan mampu menggambarkan dan mewakili Indonesia bagian Barat sedangkan pulau Sulawesi mewakili Indonesia tengah dan timur. Periode yang diambil antara tahun 2010 – 2012 dengan menggunakan data panel dimana akan dipilih pendekatan yang terbaik dari *common effects*, *fixed effect* atau *random effect*. Untuk mengatasi berbagai macam asumsi klasik maka digunakanlah pendekatan *Feasible Generalized Least Square (FGLS)*.

Guna mengetahui dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah peneliti mengadopsi model pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Kemudian diadopsi bersama dengan variabel kontrol model dari Nobuo Akai (2002) seperti *Openess*, pertumbuhan penduduk dan pendidikan sebagai berikut dirumuskan seperti rumus (1).

$$\text{GrY}_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \text{RBM}_{lit} + \beta_2 \text{AI}_{lit} + \beta_3 \text{AI}_{lit} + \beta_4 (\text{GrG})_{it} + \beta_5 (\text{GrJP})_{it} + v_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Variabel terikat dalam penelitian yang dilakukan adalah pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan pertumbuhan PDRB di setiap provinsi. Variabel bebas pada penelitian ini menggunakan pengeluaran pemerintah dan untuk variabel kontrol menggunakan, pertumbuhan jumlah penduduk. Definisi operasional variabel-variabel tersebut adalah, *pertama* pertumbuhan ekonomi digunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto. *Kedua*, Pengeluaran pemerintah menggunakan Rasio Belanja Modal (RBM) yang merupakan proxy untuk ukuran kemampuan daerah dalam pelaksanaan belanja modal daerah terkait dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Rasio Belanja Modal di dapatkan dari rasio antara belanja modal kabupaten atau kota terhadap total belanja kabupaten atau kota, belanja modal kabupaten atau kota digunakan dalam satuan juta rupiah. *Ketiga*, *Authority Indicator (AI_I)* adalah proxy yang digunakan sebagai ukuran kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi. *Authority Indicator* didapatkan dari pendapatan asli daerah kabupaten/ Kota terhadap penerimaan total kabupaten/Kota dengan tidak menyertakan transfer dari provinsi.

Keempat, transfer dan penerimaan total provinsi dalam satuan juta rupiah *Authority Indicator (AI_{II})* adalah proxy yang digunakan sebagai ukuran kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Authority Indicator didapatkan dari rasio pendapatan asli daerah kabupaten/kota terhadap penerimaan total provinsi dengan memasukkan transfer dari provinsi dan pemerintah pusat. Nilai pendapatan dan penerimaan total provinsi dalam satuan juta rupiah. *Kelima* Pertumbuhan Jumlah Penduduk (GrJP) adalah proxy yang digunakan untuk menggambarkan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. *Keenam* Pertumbuhan belanja pemerintah daerah (GrG) adalah ukuran untuk mengetahui tingkat perkembangan total belanja daerah di setiap tahunnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelimpahan wewenang dan tata kelola keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dapat memberi ruang kepada daerah untuk meningkatkan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Melalui keleluasaan pengelolaan keuangan diharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan ekonomi di daerah tidak hanya melalui pelimpahan kewenangan dan keuangan saja. Kebijakan lain untuk meningkatkan ekonomi daerah juga dilakukan oleh pemerintah pusat salah satunya melalui kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan upaya dalam memaksimalkan eksploitasi sumber daya sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing.

Perubahan pola pengelolaan keuangan pasca diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 1999 telah memberikan banyak perubahan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah yang dipandang memiliki informasi lebih mengenai keunggulan daerahnya diharapkan mampu mengelola dana transfer dari pemerintah pusat.

Seperti terlihat pada Tabel 1 bahwa sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat masih sedikit yaitu 503 Milyar untuk dana bagi hasil dan meningkat menjadi 3,5 Triliun di tahun 2000. Namun jika dibandingkan dengan setelah desentralisasi jumlah tersebut sangat sedikit bahkan terjadi peningkatan sebesar 4,9 kali dari tahun 2000 ke 2001. Secara bertahap pemerintah pusat telah memberikan dana yang berlimpah untuk daerah dengan tujuan pemerintah daerah mampu meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) supaya kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pada masa sebelum desentralisasi diberlakukan pemerintah daerah tidak diberikan kesempatan untuk dapat mengelola keuangannya sendiri termasuk alokasi belanja daerah. Seluruh belanja kegiatan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, hal tersebut akan berdampak kepada terhambatnya ide kreatif daerah dalam pengembangan pembangunan daerah.

Dana Alokasi Umum yang berfungsi sebagai penyelaras keuangan daerah telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pasca desentralisasi, informasi pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dana alokasi umum untuk daerah dengan 27 provinsi pada tahun 1990 sebesar 6,5 Triliun dan meningkat pesat di tahun 2012 menjadi 273,8 Triliun Rupiah. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pemerintah pusat sangat mengharapkan peran aktif dari alokasi belanja yang tepat dari pemerintah daerah. Seiring dengan berjalannya waktu pemerintah daerah menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah daerah, hal tersebut dapat berdampak positif bagi daerah dengan berasumsi bahwa dana perimbangan merupakan tambahan modal bagi pemerintah daerah dengan harapan penambahan dana tersebut mampu dijadikan pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari 10 tahun di Indonesia secara perlahan telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Nilai pertumbuhan dapat semakin besar ketika modal yang diterima oleh pemerintah daerah dialokasikan atau dibelanjakan pada sektor yang dapat memicu kegiatan ekonomi secara luas.

Seiring dengan besarnya limpahan wewenang dari pemerintah pusat, desentralisasi memberi dampak kepada biaya pelaksanaan pemerintahan yang semakin tinggi. Secara rata-rata rasio transfer terhadap total pendapatan Provinsi mengalami penurunan hingga dibawah 50% di tahun 2012. Penurunan rasio tersebut memberi indikasi awal bahwa desentralisasi tidak selalu memberi efek negatif terhadap ketergantungan pendanaan. Dibutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memberi ruang kepada daerah dalam memenuhi kegiatan pemerintah daerah dari pendapatan asli daerah.

Desentralisasi yang digambarkan dengan belanja modal daerah terbukti mampu membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengaruh positif

Tabel 1. Perkembangan Dana Perimbangan (Milyar Rupiah)

Keterangan	Tahun				Skala Perubahan		
	1990	2000	2001	2012	1990-2000	2001-2012	2000-2001
Dana Bagi Hasil	503	3,54	21,18	108,42	6.0	4.1	4.98
Dana Alokasi Umum	6,55	30,35	60,51	273,81	3.6	3.5	0.99
Dana Alokasi Khusus	-	-	701	26,11	0.0	36.3	
Dana Perimbangan	7,06	33,89	82,40	408,35	3.8	4.0	1.43

Sumber : SEKI Bank Indonesia (data diolah), 2014

tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memulai proses transisi untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui keuntungan belanja modal. Salah satu yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam belanja modal adalah belanja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik ataupun untuk masyarakat luas dengan tujuan meningkatkan kualitas ketersediaan tenaga kerja.

Seiring dengan peningkatan proporsi dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Tabel 1) diharapkan mampu meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimiliki. Dana transfer yang diberikan tidak hanya berfungsi untuk menutup selah fiskal yang dihasilkan dari aktivitas pemerintah daerah, namun lebih kepada memberikan stimulus untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Stimulus yang diberikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat berupa belanja daerah dibidang pendidikan. Pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dapat berupa pendidikan formal maupun non formal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan daya tawar pada pasar tenaga kerja.

Keterangan: Dep.var pertumbuhan PDRB (2010-2013) pada Tabel 2 ditunjukkan nilai koefisien (baris pertama) dan t-statistik (baris kedua) dengan level signifikansi 10% (***) 5%(**) 1%(*). Jumlah observasi sebanyak 644 kab/kota di Pulau Jawa & Sulawesi

Beberapa skenario yang diambil untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dari desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu (Tabel 2). Hasil menunjukkan dengan menggunakan seluruh variabel desentralisasi (skenario 3 pada 1.3 di Tabel 2) yang digunakan menggambarkan bahwa unttuk rasio belanja modal (RBM) yang menggambarkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan belanja modal daerah terkait dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke

Tabel 2. Output Regresi dengan Random effect FGLS

Variabel	1.1	1.2	1.3
RBM	0,857 [37,16]*	0,829 [35,04]*	0,846 [36,33]*
AI1	0,046 [6,91]*	-	0,0391 [5,43]*
AI2	-	0,137 [5,056]*	0,0824 [2,899]*
GRBELANJA	0,002 [0,490]	0,0002 [0,055]	0,0017 [0,410]
GRJP	0,047 [1,27]	0,0214 [0,569]	0,0435 [1,179]
Coef.	-0,01 [-1,45]	0,0044 [0,709]	-0,0128 [-1,4]***
R ²	0,685	0,608	0,69

Sumber : hasil olah data, 2014

Gambar 1. Rata-rata perkembangan Belanja dan Transfer 2005-2010



Sumber : DJKP, data diolah, 2014

pemerintah daerah menunjukkan hasil yang positif.

Besaran belanja modal menjadi salah satu alat untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pola konsumsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja daerah, namun belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dari sisi

Tabel 3. Rasio PAD dan DAPER terhadap Total Pendapatan

Pulau	Rata-rata Rasio PAD thd Total Pendapatan					Rata-rata Rasio DAPER thd Total Pendapatan				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Sumatera	44%	35%	33%	39%	41%	75%	49%	50%	55%	52%
Jawa	67%	61%	55%	63%	63%	37%	21%	33%	36%	36%
Kalimantan	42%	36%	29%	38%	42%	88%	32%	52%	60%	56%
Sulawesi	26%	22%	23%	27%	28%	82%	60%	75%	69%	68%
Bali, NTT & NTB	42%	41%	38%	40%	40%	60%	44%	62%	59%	57%
Papua	5%	3%	5%	5%	5%	76%	24%	66%	66%	31%

Sumber : DJKD data diolah. 2014

peningkatan konsumsi masyarakat (Gambar 1). Nilai positif pada rasio belanja pegawai menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dipicu dari peningkatan pendapatan masyarakat, dimana peningkatan pendapatan tersebut diperoleh dari tingginya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada sisi lain seharusnya peningkatan pendapatan pegawai provinsi lebih disebabkan dari peningkatan PAD, namun PAD hanya membiayai pengeluaran rutin daerah kurang dari 30 persen (Iskandar, 1993). Sehingga kebutuhan rutin pemerintah daerah sebagian besar dipenuhi oleh dana transfer, hal tersebut yang membuat proporsi dana transfer untuk pembangunan daerah berkurang.

Masih pada skenario yang ketiga variabel kedua yaitu AI_I yang menggambarkan ukuran kemampuan daerah dari transfer dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi, dimana rasio tersebut menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan total (tanpa transfer pemerintah pusat). Hasil analisis menunjukkan nilai yang positif dan signifikan yang berarti bahwa setiap peningkatan penerimaan dengan menghilangkan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan direspon dengan pertumbuhan ekonomi yang positif pula.

Besaran pertumbuhan ekonomi daerah tanpa adanya transfer dari pemerintah pusat menjadi sebuah hasil yang menarik. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat ditiadakan. Indikasi yang lain untuk menggambarkan hasil tersebut adalah telah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang mampu dipergunakan untuk menggerakkan perekonomian.

Belanja pemerintah daerah merupakan stimulus dalam menggerakkan perekonomian. Meskipun belanja yang dipergunakan sebagian besar dipergunakan untuk belanja kegiatan rutin seperti

belanja pegawai, jika dilihat dari sisi konsumsi setiap pengeluaran dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pemberian remunerasi, insentif tambahan bagi pegawai pemerintah daerah dan bonus lainnya dalam jangka pendek dapat meningkatkan konsumsi masyarakat yang kemudian dikonversi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi.

Provinsi yang terletak di pulau Jawa dan Sumatera menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten meskipun terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kegiatan bisnis pemerintah daerah yang dilakukan BUMD dan pendapatan dari retribusi mampu mengurangi beban belanja rutin. Secara rata-rata rasio yang dihasilkan dari PAD terhadap total pendapatan di Pulau Jawa lebih dari 50% (Tabel 3).

Hasil analisis pada variabel ketiga yaitu AI_{II} yang merupakan ukuran kemampuan pendapatan asli daerah dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai yang dihasilkan dari analisis adalah positif 0,0824 dengan level signifikansi dibawah 1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hasil berbeda didapatkan antara skenario ke dua (hasil 1.2) dan ketiga (1.3) terutama pada nilai koefisiennya. Jika berasumsi semua variabel dianggap konstan, maka skenario kedua menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi di daerah, namun hal sebaliknya ditunjukkan pada hasil dengan skenario 1.3.

Secara umum dari sampel yang diambil yaitu pada seluruh kabupaten dan kota yang berada di pulau Jawa dan Sulawesi dapat dinyatakan bahwa pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Meskipun belum semua indikator desentralisasi menunjukkan arah yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun beberapa hal penting seperti kemampuan pemerintah daerah dalam membelanjakan keuangan

yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi serta kemampuan PAD dalam memicu pertumbuhan ekonomi (AI_{II}) dapat mewakili representasi keberhasilan penerapan desentralisasi di Indonesia.

Meskipun hasil dari analisis pada kabupaten dan kota yang berada di pulau Jawa dan Sulawesi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan atas pertumbuhan belanja dengan pertumbuhan ekonomi, namun keberadaannya menunjukkan arah yang positif. Hasil tersebut menghasilkan gambaran bahwa besaran belanja pemerintah daerah akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tidak terbatas kepada belanja modal saja, namun berbagai macam pengeluaran pemerintah akan selalu direspon positif oleh pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan kuantitas menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi semakin baik. Belanja pegawai yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang proporsinya secara rata-rata dapat mencapai lebih dari 40% tentu akan direspon positif oleh pertumbuhan ekonomi.

Desentralisasi menyarankan untuk meminimumkan celah fiskal supaya pertumbuhan ekonomi di daerah lebih baik. Kemampuan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan tujuan untuk mengurangi celah fiskal yang terjadi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan memperhatikan dan meningkatkan sumber daya manusia serta peningkatan sarana infrastruktur guna memperlancar roda perekonomian. Desentralisasi fiskal terhambat jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai dibanding pemerintah pusat (Rodden dan Rose-Ackerman, 1997).

Kemampuan daerah dalam menciptakan pendapatan asli menyebabkan ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat. Setidaknya terdapat lima penyebab utama rendahnya pendapatan asli daerah (Kuncoro, 2010): *pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; *kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan; *ketiga* kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; *keempat*, faktor politis, terdapat kekhawatiran jika daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separtisme; *kelima*, kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan subsidi dalam bentuk *block grants* dan spesifik. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa

daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana subsidi blok, sedang penggunaan dana subsidi spesifik sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak punya keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik jika Pendapatan asli daerah mampu mencukupi kebutuhan fiskal serta dapat memenuhi kebutuhan publik. Hasil analisis menunjukkan nilai yang positif dan signifikan pada pengaruh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Nilai yang positif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam memenuhi standart pelayanan minimum yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat terselenggara dari pendanaan Pendapatan Asli Daerah.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah akan semakin efektif jika nilai rasio otonomi yang dihasilkan semakin besar, selain itu otonomi menjadi semakin baik jika kebutuhan fiskal daerah dibiayai dari pendapatan asli daerah (Akai Sakata, 2002). Pendapatan asli daerah sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki serta jumlah penduduk. Pendapatan pajak dan retribusi merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, namun jika daerah yang berpenduduk sedikit maka pemanfaatan sumber daya alam oleh BUMD dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan daerah melalui transfer menjadi variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin besar peranan dana transfer dalam menutup kebutuhan fiskalnya maka akan mengurangi kemandirian pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif yang ditunjukkan dalam analisis antara pendapatan asli daerah dengan pertumbuhan ekonomi telah menggambarkan bahwa investasi pemerintah di sektor layanan umum tidak secara langsung dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kabupaten dan kota yang terletak di pulau Jawa menunjukkan kemandirian dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan mencapai lebih dari 50%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan peran aktivitas ekonomi daerah dalam menyumbang pendapatan. Pemerintah pusat dapat mengurangi proporsi DAU yang kemudian diganti dengan DAK untuk membantu pemerintah daerah pada masalah yang paling substansial yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam undang-undang pemerintah daerah

memang diberikan ruang untuk mendapatkan nilai tambah dari dana transfer dari sisi DAU. Tambahan tersebut diakibatkan kebutuhan fiskal dari pemerintah daerah yang tidak mampu dicukupi dari pendapatan asli daerah. Pada fase awal desentralisasi fiskal diberlakukan peran pemerintah pusat dalam menutup kebutuhan fiskal pemerintah daerah mutlak diperlukan. Diharapkan desentralisasi fiskal di era otonomi daerah mampu tercukupi dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil merupakan indikator kekuatan ekonomi daerah dari aktivitas masyarakat yang dilihat dari penerimaan pajak. Semakin besar Dana Bagi Hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah, maka mengindikasikan bahwa pemerintah telah terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di daerah. Namun jika terjadi penignakatan pada Dana Alokasi Umum maka mengindikasikan bahwa daerah belum mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan fiskalnya.

Dana Alokasi Khusus merupakan pendanaan pemerintah pusat untuk program yang menjadi prioritas Nasional. Pelaksana dari DAK adalah pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Semakin kecil DAK maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah telah mampu menyediakan serta melaksanakan program prioritas Nasional.

Pemerintah daerah sebagai penyedia kebutuhan publik diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. kegiatan masyarakat menjadi lebih lancar jika sarana infrastruktur dapat terpenuhi dengan baik. Layanan pemerintah dalam penyediaan sarana infrastruktur dapat meningkatkan arus investasi di daerah.

Infrastruktur merupakan salah satu cara untuk menarik investor, namun ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi menjadi kekuatan dalam menggerakkan roda perekonomian. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik apabila berpedoman pada kualitas sumberdaya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat Halim (2007). Meningkatnya sumber daya manusia di daerah akan memberikan berbagai macam dampak positif bagi pembangunan daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan swasta menjadi lebih baik karena mendapatkan input produksi sumber daya manusia yang semakin baik. Hal tersebut akan berdampak pada alur investasi daerah yang semakin meningkat.

Pembentukan pendapatan asli daerah dari kegiatan ekonomi masyarakat menjadi tujuan utama pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah dapat berupa

sumber daya alam ataupun bentuk aktifitas lain seperti jasa. Namun peran pemerintah pada masa desentralisasi akan menjadi penting karena pengaruh dari desentralisasi sangat tergantung pada institusi fiskal dan sistem politik yang ada di negara tersebut. Desentralisasi fiskal terhambat jika pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai dibanding pemerintah pusat (Rodden dan Rose-Ackerman, 1997).

SIMPULAN

Meningkatnya belanja pemerintah daerah akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan belanja dapat dilakukan di sisi pengeluaran rutin seperti belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai mampu meningkatkan konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja modal pada era desentralisasi dimana pemerintah daerah telah diberikan kewenangan sepenuhnya dalam mengalokasikan belanja modal secara bertahap telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya pada bentuk fisik kegiatan, namun juga pada sektor peningkatan sumber daya manusia, dimana hal tersebut akan membentuk pertumbuhan ekonomi yang konsisten.

Variabel *Authority Indicator* (AI_I dan AI_{II}) yang merupakan ukuran kemampuan daerah dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi di daerah mempunyai nilai yang positif dan signifikan. Indikator desentralisasi kemampuan pendapatan asli daerah dalam pembentukan total pendapatan telah menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

SARAN

Kebijakan desentralisasi tidak hanya kepada pengelolaan keuangan namun juga administrasi dan politik, oleh sebab itu perlu dilakukan kajian yang lebih merata terhadap gambaran dari desentralisasi. Melihat kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan jauh lebih besar dibandingkan kontribusi PAD sehingga memunculkan kesenjangan kekuasaan penerimaan dan belanja sehingga perlu ditinjau ulang keseimbangan antara fungsi, tugas dan kewajiban antar tingkat pemerintahan dapat tercapai.

Penelitian yang telah dilakukan memiliki keterbatasan dalam analisis yaitu belum terwakilinya seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga penelitian hanya menghasilkan kesimpulan secara

sampel yang mewakili beberapa kabupaten dan kota di wilayah Indonesia bagian Barat dan beberapa kota di Indonesia bagian timur.

REFERENSI

- Anis, & Ardi. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Aschauer, D. A. (2000). Public capital and economic growth: issues of quantity, finance, and efficiency. *Economic Development and Cultural Change*, 48(2), 391-406.
- Baffes, J., & Shah, A. (1998). Productivity of public spending, sectoral allocation choices, and economic growth. *Economic Development and Cultural Change*, 46(2), 291-303.
- Brata, A., & Arifin, Z. (2003). Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia. *Media Ekonomi*, 13(20), 59-71.
- Davoodi, H., & Zou, H.-f. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43, 244-257.
- Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of monetary economics*, 37(2), 313-344.
- Globerman, S., & Shapiro, D. (2002). Governance infrastructure and US foreign direct investment. *Journal of International Business Studies*, 34(1), 19-39.
- Halim, A. (2007). Pengelolaan keuangan daerah yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Jin, J., & Zou, H. (2002). How does fiscal decentralization affect aggregate, national, and subnational government size? *Journal of Urban Economics*, 52(2), 270-293.
- Laras, W., & Priyo, H. (2008). Perilaku asimetris Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat, The 2nd national Conference UKWMS.
- Martinez, V. J., & McNab, R. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World development*, 31(9), 1597-1616.
- Morrison, C., & Schwartz, A. (1992). State infrastructure and productive performance. *National Bureau of Economic Research*.
- Muslimin. (2010). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peran Kelembagaan Dana Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat. *Publikasi Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Nobuo Akai, and Masayo Sakata. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of Urban Economics*, 52, 93-108.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax journal*, 46(2), 237-243.
- Priyo, H. (2005). Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada kabupaten dan kota se Jawa-Bali). *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW*.
- Rappaport, J. (1999). Local growth empirics.
- Richard, B. M., & Villancourt, F. (2002). Desentralisasi Fiskal negara-negara Berkembang. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rodden, J., & Rose-Ackerman, S. (1997). Does federalism preserve markets? *Virginia Law Review*, 1521-1572.
- Shah, A., & Mundial, B. (1994). The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging market economies *World Bank*.
- Stinglitz, J. (2000). Economics of the Public Sector. Third Ed. New York: W.W. Norton & Company.
- Thornton, J. (2007). Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. *Journal of Urban Economics*, 61, 64-70.
- Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. (1999). Fiscal decentralization and economic growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, 45, 228-239.
- Zhang, T., & Zou, H. F. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of public economics*, 67(2), 221-240.